

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Indonesia memasuki masa penataan negara yang penuh tantangan. Pemerintah tidak hanya harus menata sistem pemerintahan, tetapi juga membangun organisasi pertahanan yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pada awal dekade 1950-an, kondisi politik dan militer Indonesia masih belum sepenuhnya stabil karena negara yang baru terbentuk harus menghadapi perubahan sistem pemerintahan, persoalan keamanan, serta penataan organisasi Angkatan Perang.

Dalam bidang politik, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 dan menjalankan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam sistem tersebut, pemerintahan sangat bergantung pada dukungan parlemen. Perbedaan kepentingan antarpolisi menyebabkan kabinet sering mengalami pergantian sehingga stabilitas pemerintahan sulit dipertahankan. Situasi ini juga memengaruhi hubungan antara lembaga politik dan militer, terutama dalam menentukan kedudukan serta arah pembangunan Angkatan Perang.

Pada bidang militer, pemerintah menghadapi persoalan penataan organisasi setelah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. TNI yang lahir dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan harus digabungkan dengan bekas anggota KNIL yang sebelumnya menjadi bagian dari tentara kolonial Belanda. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan orientasi menimbulkan berbagai persoalan dalam proses integrasi. Pemerintah dan pimpinan Angkatan Darat kemudian menjalankan reorganisasi untuk membentuk angkatan perang yang lebih teratur dan profesional.

Proses penataan tersebut tidak selalu diterima oleh seluruh pihak. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan organisasi militer berkembang menjadi ketegangan antara sejumlah perwira Angkatan Darat, pemerintah, dan parlemen. Ketegangan itu mencapai salah satu puncaknya dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut tidak hanya memperlihatkan persoalan hubungan sipil dan militer, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap kondisi internal Angkatan Darat di tingkat pusat maupun komando-komando teritorial.

Salah satu perwira yang menjalankan tugas pada masa tersebut adalah Donald Izacus Pandjaitan. D.I. Pandjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara, pada 9 Juni 1925. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan memperoleh pendidikan yang turut membentuk sikap disiplin serta tanggung jawabnya. Pada masa pendudukan Jepang, Pandjaitan mengikuti pendidikan militer *Giyugun* dan kemudian ditugaskan di Pekanbaru dengan pangkat syodanco atau setingkat letnan dua (Atmowiloto, 1986).

Setelah kemerdekaan, D.I. Pandjaitan bergabung dengan angkatan perang Indonesia dan memperoleh sejumlah penugasan di wilayah Sumatera. Ia pernah bertugas di lingkungan TT I/Bukit Barisan sebelum kemudian ditempatkan di TT II/Sriwijaya. Penugasan tersebut membawa Pandjaitan ke dalam situasi politik dan militer yang berkembang setelah Peristiwa 17 Oktober 1952. Kedudukannya sebagai perwira staf membuatnya berhadapan langsung dengan persoalan organisasi dan hubungan antarpersonel di lingkungan komando teritorial.

Karier D.I. Pandjaitan kemudian berkembang hingga ia dipercaya menjabat sebagai Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat yang membidangi urusan logistik. Jabatan tersebut memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesiapan Angkatan Darat. Dalam organisasi militer, logistik bukan hanya urusan administratif, tetapi menjadi salah satu unsur yang mendukung pelaksanaan tugas pertahanan. Oleh karena itu, kedudukan Pandjaitan sebagai Asisten IV menunjukkan bahwa perannya dalam Angkatan Darat tidak dapat dilepaskan dari usaha membangun

kesiapan pertahanan negara.

Perjalanan karier D.I. Pandjaitan berlangsung dalam dua masa politik yang berbeda, yaitu Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Perubahan sistem politik tersebut turut memengaruhi hubungan antara Presiden Soekarno, partai politik, dan Angkatan Darat. Pada masa Demokrasi Terpimpin, persaingan politik semakin tajam dan menyeret institusi militer ke dalam berbagai isu politik. Situasi tersebut terus berkembang hingga terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan D.I. Pandjaitan gugur bersama sejumlah perwira Angkatan Darat lainnya.

Setelah peristiwa tersebut, D.I. Pandjaitan lebih banyak dikenal sebagai salah satu Pahlawan Revolusi. Namanya kerap muncul dalam narasi mengenai penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat. Namun, pengenalan masyarakat terhadap dirinya umumnya berhenti pada peristiwa akhir hidupnya. Perjalanan karier dan kedudukannya dalam perkembangan Angkatan Darat sebelum tahun 1965 belum banyak mendapat perhatian secara khusus.

Kajian mengenai D.I. Pandjaitan terutama ditemukan dalam buku *Major Jenderal Anumerta D.I. Pandjaitan* karya Mardanas Safwan dan *D.I. Pandjaitan: Gugur dalam Seragam Kebesaran* karya Marieke Pandjaitan br. Tambunan dan Sriwibawa. Kedua karya tersebut memberikan informasi penting mengenai latar belakang keluarga, pendidikan, perjalanan karier, serta kehidupan pribadi D.I. Pandjaitan. Meskipun demikian, pembahasannya lebih banyak disusun dalam bentuk biografi kronologis.

Peristiwa 17 Oktober 1952, penugasan D.I. Pandjaitan di TT II/Sriwijaya, jabatannya sebagai Asisten IV/Logistik, serta kedudukannya dalam dinamika politik menjelang G30S telah disinggung dalam beberapa karya. Akan tetapi, bagian-bagian tersebut belum banyak ditempatkan sebagai fokus utama untuk melihat perannya dalam konteks politik-militer dan pertahanan negara. Kajian sejarah militer Indonesia juga lebih sering menyoroti tokoh-tokoh yang berada dalam posisi pimpinan utama atau terlibat langsung dalam konflik politik terbuka.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki celah berupa masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan perjalanan karier D.I. Pandjaitan dengan dinamika internal Angkatan Darat setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, kedudukannya dalam bidang logistik, dan situasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini tidak hanya menempatkan D.I. Pandjaitan sebagai korban G30S, tetapi sebagai perwira Angkatan Darat yang menjalankan sejumlah tanggung jawab penting dalam periode 1952–1965.

Pembahasan penelitian kemudian diarahkan pada dua pokok utama. Bab II mengkaji konteks politik-militer awal 1950-an, Peristiwa 17 Oktober 1952, serta kedudukan D.I. Pandjaitan di lingkungan TT II/Sriwijaya. Bab III membahas situasi politik Demokrasi Terpimpin, pengangkatan D.I. Pandjaitan sebagai Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat, dan perkembangan politik menjelang Peristiwa G30S. Arah tersebut disesuaikan dengan struktur dan fokus pembahasan dalam skripsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana peran D.I. Pandjaitan dalam merespons pergolakan pasca-Peristiwa 17 Oktober 1952 serta kontribusinya dalam mendukung kesiapan pertahanan negara? Selanjutnya, bagaimana posisi dan keterlibatan D.I. Pandjaitan dalam dinamika politik internal Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin?

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan pembatasan masalah agar penelitian yang ingin dikaji peneliti bisa lebih terarah dan juga terfokus pada topik yang telah ditentukan, selain itu pembatasan masalah juga berguna agar suatu penelitian tidak abstrak. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, di antaranya:

- a. Secara temporal, penelitian ini mengambil rentang tahun 1952-1965. Tahun 1952 dipilih sebagai titik awal karena pada periode tersebut D.I. Pandjaitan mulai menunjukkan peran strategisnya dalam

pergolakan pasca Peristiwa “17 Oktober 1952” di lingkungan TNI AD dalam upaya menjaga disiplin dan solidaritas kesatuan. Adapun tahun 1965 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena merupakan fase puncak dinamika politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin sekaligus akhir pengabdian D.I. Pandjaitan setelah gugur dalam peristiwa G30S saat menjabat sebagai Asisten IV/Logistik Menteri/Panglima Angkatan Darat.

- b. Secara spasial, penelitian ini memfokuskan kajian pada wilayah Indonesia dan Jerman Barat sebagai konteks tempat D.I. Pandjaitan menjalankan peran dan kontribusinya dalam bidang pertahanan negara.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran D.I. Pandjaitan dalam merespons pergolakan pasca “Peristiwa 17 Oktober 1952” serta bagaimana kontribusinya dalam mendukung kesiapan pertahanan negara?
- b. Bagaimana posisi dan keterlibatan D.I. Pandjaitan dalam dinamika politik internal Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti, maka tujuan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menguraikan peran D.I. Pandjaitan dalam merespons dampak pergolakan pasca “Peristiwa 17 Oktober 1952” serta kontribusinya dalam mendukung kesiapan pertahanan negara.
- 2) Menjelaskan posisi dan keterlibatan D.I. Pandjaitan dalam dinamika politik internal Angkatan Darat pada masa Demokrasi Terpimpin.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka kegunaan penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah militer dan politik Indonesia, khususnya terkait pengalaman, pola pikir, dan strategi perwira tinggi Angkatan Darat. Dengan menelusuri pengalaman militer D.I. Pandjaitan di awal 1950-an, lalu ikut berkontribusi dalam pemulihan pasca pergolakan politik “Peristiwa 17 Oktober 1952” hingga jabatannya sebagai Asisten IV/Logistik Menteri/Panglima Angkatan Darat, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengalaman militer membentuk tindakan, keputusan, dan strategi dalam konteks pertahanan negara. Selain itu, kajian ini menyoroti keterkaitan antara posisi perwira tinggi di Angkatan Darat dengan dinamika kekuasaan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada interaksi militer-politik Indonesia pada awal 1950-an hingga pertengahan 1965-an. Hasil penelitian ini diharapkan juga berfungsi sebagai dokumentasi ilmiah yang memperkuat pemahaman tentang hubungan antara militer dan kekuasaan politik di Indonesia.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini menyediakan rujukan historis untuk memahami peran strategis D.I. Pandjaitan dalam konteks pertahanan negara dan dinamika politik menjelang peristiwa G30S 1965. Penyajian kronologis peristiwa memfasilitasi analisis keterkaitan antara militer dan kekuasaan politik, sekaligus memperjelas posisi korban sejarah, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pembelajaran dalam studi sejarah militer-politik.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "*Peran Strategis D.I. Pandjaitan dalam Pertahanan Negara dan Dinamika Politik Menjelang Peristiwa G30S (1952- 1965)*" menggunakan metode sejarah dan penulisannya bersifat deksriptif- naratif. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Proses metode sejarah itu, sejarawan membahas apa yang dinamis atau genetis (yang menjadi), apa yang statis (yang ada atau yang terjadi), dan ia berusaha untuk bersikap interpretatif (menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan saling berhubungan), serta bersifat deskriptif (menceritakan apa, bilamana, di mana, dan siapa yang ikut serta di dalamnya) (Gottschalk, 2008).

Berdasarkan proses metode sejarah di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode sejarah itu mengajarkan kita untuk melihat peristiwa masa lalu dari dua sisi, yakni yang sifatnya tetap (apa yang ada dan terjadi) dan yang sifatnya berkembang (bagaimana sesuatu bisa terjadi dan memiliki keterkaitan). Intinya, metode sejarah tidak hanya bertujuan untuk menguak suatu fakta, melainkan juga untuk menafsirkan hubungan sebab-akibat di balik sebuah peristiwa.

Ketika kita membahas lebih jauh mengenai metode historis, maka secara otomatis kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode historis (Padiatra, 2020). Terdapat lima tahapan penulisan metode historis menurut Kuntowijoyo yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber, relavansi sumber), interpretasi (analisa dan sintesis), dan yang terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi).

1) Pemilihan Topik

Pemilihan topik dianggap jadi langkah paling awal dalam

penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, topik yang akan dijadikan penelitian sejarah itu cukup banyak, maka dari itu penting bagi peneliti untuk menemukan topik terlebih dulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini menaruh perhatian pada sosok D.I. Pandjaitan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk melihat peran dan kedudukan tokoh tersebut dalam konteks sejarah yang lebih luas, tidak hanya sebagai figur yang hadir dalam peristiwa G30S 1965. Selama ini, pembahasan mengenai D.I. Pandjaitan cenderung muncul secara terbatas dan belum menempatkan kontribusinya secara proporsional dalam sejarah nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi peran D.I. Pandjaitan dalam pertahanan negara juga sikapnya dalam menghadapi dinamika politik saat Demokrasi Terpimpin.

2) Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Menurut Renier (1997) “istilah *heuristik* berasal dari kata Yunani *heuriskein* yang artinya memperoleh, yakni suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu”. Heuristik dapat dipahami sebagai suatu tahap bagi peneliti untuk berupaya menelusuri, mendapatkan, dan menghimpun berbagai macam sumber informasi, baik berupa lisan maupun tulisan. Peneliti sudah mendapatkan dan menghimpun beberapa sumber-sumber bacaan yang akan digunakan sepanjang penelitian dilakukan. Penulis menemukan beberapa sumber bacaan di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, ANRI, Perpustakaan Nasional RI, Pusat Sejarah TNI (Perpustakaan TNI & Bidang Dokumentasi), dan internet.

3) Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah seluruh sumber sejarah terkumpul, penelitian

dilanjutkan ke tahap verifikasi atau kritik sumber. Tahap ini bertujuan untuk menilai sumber dan informasi secara kritis sebelum digunakan dalam penyusunan fakta sejarah. Dalam metode sejarah, kritik sumber terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber berdasarkan bentuk fisik dan unsur lain yang berkaitan dengan autentisitas sumber. Dalam penelitian ini, kritik eksternal dilakukan dengan mempertimbangkan asal sumber yang diperoleh dari lembaga resmi, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Bidang Dokumentasi Pusat Sejarah TNI, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Terhadap arsip dan surat kabar lama yang ditemukan di Perpustakaan Nasional RI Salemba, penulis juga memperhatikan kondisi kertas, gaya bahasa, bentuk penulisan, serta penanggalan dokumen. Seperti memverifikasi surat kabar *Mestika* dari tanggal terbit dan gaya penulisannya yang relevan dengan waktu kejadian ‘Peristiwa 17 Oktober 1952’.

Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas dan kebenaran informasi yang terdapat dalam sumber. Penulis membandingkan isi dan konteks dari berbagai sumber, salah satunya dua buku biografi D.I. Pandjaitan, yaitu *D.I. Pandjaitan: Pahlawan Revolusi Gugur dalam Seragam Kebesaran* karya Marieke Pandjaitan dan Sriwibawa serta *Major Jenderal Anumerta D.I. Pandjaitan* karya Mardanas Safwan. Meskipun sama-sama membahas riwayat kehidupan D.I. Pandjaitan, kedua buku tersebut memiliki penekanan yang berbeda. Buku pertama memaparkan perjalanan karier dan keterlibatan D.I. Pandjaitan dalam berbagai peristiwa secara lebih terperinci, sedangkan buku kedua lebih banyak menyoroti rencana dan pelaksanaan peristiwa G30S yang menyebabkan gugurnya D.I. Pandjaitan.

4) Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi merupakan bagian dari metode sejarah yang berperan untuk menafsirkan berbagai fakta sejarah dengan maksud untuk membangun kembali realitas masa lampau. Pada tahap ini, peneliti berupaya menghubungkan lalu menafsirkan hubungan antar fakta-fakta agar membentuk gambaran yang bermakna tentang peristiwa sejarah yang terjadi (Daliman, 2012). Interpretasi sejarah memiliki dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi (Halim & Al, 2021). Dalam penelitian ini dapat diuraikan lewat berbagai sumber, peran D.I. Pandjaitan dari saat ia ditugaskan di daerah seperti Palembang yang terkena dampak dari “Peristiwa 17 Oktober 1952” sampai menjadi Asisten IV/Logistik Menteri/Panglima Angkatan Darat, lalu menggambarkan situasi politik yang terjadi menjelang terjadinya peristiwa G30S yang berkaitan dengan D.I. Pandjaitan sebagai salah satu target penculikan serta pembunuhan. Lalu, setelah menguraikannya akan dilakukan yang namanya penyatuan atau pembauran semua fakta yang didapat dari berbagai sumber dan kesaksian yang digunakan dalam penelitian ini untuk membentuk suatu narasi sejarah dan nantinya akan ditulis dalam tahap historiografi.

5) Historiografi (Penulisan)

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu proses menyusun dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah. Historiografi dapat dipahami sebagai kegiatan penulisan, pemaparan, serta pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan secara sistematis (Abadillah, 2012). Tahap ini dilaksanakan setelah

penulis menyelesaikan seluruh rangkaian metode sejarah, mulai dari heuristik, verifikasi, hingga interpretasi. Hasil dari keseluruhan proses tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah. Penulisan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-naratif, yaitu menggambarkan berbagai peristiwa dan peranan D.I. Pandjaitan secara terperinci, runtut, dan kronologis. Penyusunan narasi tetap didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam sumber sejarah serta telah melalui proses kritik dan penafsiran menggunakan metode historis.

2. Bahan Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi buku biografi *D.I. Pandjaitan: Pahlawan Revolusi Gugur dalam Seragam Kebesaran* yang ditulis langsung oleh Marieke Pandjaitan, istri D.I. Pandjaitan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan arsip-arsip yang berkaitan dengan masa Demokrasi Terpimpin yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis juga menggunakan surat kabar dan majalah sezaman, seperti *Mestika* dan *Madjalah Kawan Tentara* yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen penting seputar peristiwa G30SPKI yang penulis dapatkan di Bidang Dokumentasi Pusat Sejarah TNI.

Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel dan jurnal ilmiah, skripsi, dan website. Buku yang penulis gunakan antara lain buku biografi *Major Jenderal Anumerta D.I. Pandjaitan* karya Mardanas Safwan, *Peristiwa 17 Oktober 1952: Ketika "Moncong" Meriam Mengarah ke Istana Merdeka* karya Jenderal Besar A.H. Nasution, *Biografi Pahlawan Nasional dari Lingkungan ABRI* yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, serta *Menyingkap Kabut Halim 1965* karya Aristides Katoppo.